

# EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

Zakiyudin Fikri

Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, Indonesia

[zakiyudinfikri@yahoo.co.id](mailto:zakiyudinfikri@yahoo.co.id)

Abstrak – Masalah pendidikan merupakan salah satu agenda besar pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap pendidikan ialah menetapkan indikator-indikator standa pelayanan pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan capaian SPM bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015. Pelaksanaan SPM pendidikan dasar di kabupaten Bangka Tengah diliat mulai dari pemahaman program, perencanaan pencapaian SPM, penentuan program dan kegiatan pendukung terlaksananya SPM pendidikan hingga perubahan nyata yang dari penerapan SPM tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan objek penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan dokumentasi terkait naskah dinas baik laporan atau pun dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini adalah selama ini pemerintah telah menjadikan urusan pendidikan prioritas kedua dalam visi pembangunan daerah serta telah meleaksanakan program-program yang tepat pendukung tercapainya SPM pendidikan dasar secara maksimal. Namun dengan demikian pencapai SPM pendidikan dasar kabupaten Bangka Tengah ini masih memiliki 7 indikator yang belum tercapai 100% sebagaimana target yang telah ditetapkan. Hal tersebut karena anggaran yang diusulkan tidak sepenuhnya di alokasikan. Hal ini mengingat keterbatasan APBD dan banyaknya prioritas lain pada pembangunan daerah kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun berikutnya penulis memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mengalokasi dana yang optimal serta pengalokasian anggaran tepat sasaran, sehingga pelaksanaan SPM pendidikan dasar bisa tercapai sesuai target yang ditetapkan

**Kata Kunci:** *Evaluasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan Dasar.*

## I. PENDAHULUAN

Mengingat masih rendahnya beberapa capaian indikator bidang pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah salah satunya adalah indikator “Di setiap SMP/MTs tersedia ruang Laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36

peserta didik” sampai tahun 2015 baru terealisasi sebesar 18,18%, sedangkan target capaian nasional mencapai 100%. Artinya masih ada gap sebesar 72,82%. Dan indikator “Disetiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik SI atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik” baru mencapai 77,27% pada tahun 2015, sedangkan target capaian nasional mencapai 100%, maka perlu dilakukan evaluasi capaian SPM bidang pendidikan agar dapat diketahui akar permasalahan dan upaya peningkatan capaian. Untuk itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada evaluasi pelaksanaan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah.

Pada penelitian ini kemudian peneliti membuat 2 (dua) rumusan masalah sebagai batasan dari bahasan tema yang peneliti ambil antara lain: (a) Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah?, (b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisa dan mendeskripsikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah.

Kajian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini antara lain: (1) Herpikus, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak. 2012 tentang Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar di Kabupaten Sanggau. Pada penelitian ini menyatakan implementasi SPM sekolah dasar di Kabupaten Sanggau masih belum terlaksana dengan maksimal karena masih rendahnya kualitas SDM baik tenaga pengajar maupun kepala sekolah. Penelitian lain yang serupa adalah Mohammad Khozin, Sinergi Visi Utama. Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 1 No. 1 Agustus 2010 tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul. Pada penelitian ini menjelaskan Bahwa pada dasarnya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan data capaian indikator dari tahun ke tahun yang telah dikompilasikan. Namun dari sekian banyak indikator capaian kinerja pelayanan yang telah ditetapkan, tetap saja ada beberapa indikator

yang tidak jelas angka capaiannya : antara lain penerbitan perijinan sarana kesehatan, penerbitan perijinan apotek dan toko obat, pelayanan operasi pada penderita katarak keluarga miskin dan pengawasan kualitas lingkungan Rumah Tangga, Pada pelayanan-pelayanan tersebut tidak didapatkan data yang akurat, sehingga menjadikan tanda tanya terhadap capaian indikator kinerja pelayannya.

#### A. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sejalan dengan hal itu, Soepomo dalam Ladjin mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri dalam kadar Negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Menurut Sarundajang tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya-tidaknya akan meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut: [1]

- a) Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- b) Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
- c) Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan upaya pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya.
- d) Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

#### B. Pelayanan Publik

Gronroos dalam Ratminto yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan

yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan [2]. A.S. Moenir menyatakan bahwa:"Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu [3]. Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Menurut A.S. Moenir unsur-unsur tersebut antara lain: a. Sistem, Prosedur dan Metode, b. Personil, c. Sarana dan prasarana, d. Masyarakat sebagai pelanggan. Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah [4].

Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing [5].

#### C. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Winarno, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut [6]. Fungsi pertama dan paling mendasar dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi mengungkap dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui tindakan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan mengungkap seberapa jauh tujuan telah terealisasi dan seberapa besar target tertentu telah tercapai. James Anderson dalam Winarno membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

##### (1) Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

##### (2) Tipe Kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

##### (3) Tipe Ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur

dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai [7].

Kriteria evaluasi kebijakan dengan demikian terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu: Pertama, efektivitas. Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai. Kedua, efisiensi. Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumberdaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Ketiga, adekuasi (kecukupan). Kriteria ini lebih mempersoalkan kememadaian hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan. Keempat, pemerataan atau ekuitas. William Ndun menjelaskan terdapat tiga pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat dalam skala luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini mengasumsikan bahwa nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan akan terbukti dengan sendirinya serta akan diukur dan dirasakan secara langsung, baik oleh individu, kelompok, maupun masyarakat.

Evaluasi formal (formal evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghimpun informasi yang valid mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan.

Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi yang bersifat sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian target atau tujuan segera setelah selesainya suatu kebijakan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya bersifat pendek dan menengah. Sedangkan evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang relatif panjang untuk memantau pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan.

#### D. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan bahwa "Efektivitas

adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya" [8].

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Srisno efektivitas, yaitu: (a) pemahaman program, (b) tepat sasaran, (c) tepat waktu, (d) tercapai tujuan, dan (e) perubahan nyata [9].

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati, dimana metode yang di gunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga di rasakan telah cukup di gunakan untuk membuat suatu interpretasi [10]. Tipe penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkenaan dengan masalah dan untuk diteliti. Sehingga dengan jenis penelitian ini penulis akan mendeskripsikan fenomena, fakta lapangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar kabupaten Bangka Tengah tahun 2015

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dengan pertimbangan salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan SPM pendidikan pada tahun 2010 Maka pada objek ini peneliti mendeskripsikan dan mengkaji lebih jauh bagaimana pelaksanaan capaian SPM bidang pendidikan dasar, mulai dari pembuatan kebijakan yang mendorong penerapan SPM hingga ketersediaan anggaran pada Dinas Pendidikan untuk program dan kegiatan pendidikan pada tahun 2015.

### C. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang paham tentang permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Moleng bahwa subjek penelitian adalah orang yang bisa dimanfaatkan dalam suatu penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu penelitian [11]. Adapun Subjek penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas
2. Bidang-Bidang yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
3. Dewan Pendidikan
4. Ketua PGRI
5. Kepala Sekolah atau Guru yang dijadikan Sample dalam mempertegas data dari Dinas Pendidikan.

### D. Jenis Data

Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan SPM bidang pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, maka Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara dengan aktor-aktor pembuatan kebijakan dalam mendukung terlaksananya SPM pendidikan. Sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan langsung kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan metode panduan wawancara mengenai objek kajian penelitian tersebut.

Sedangkan data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat digunakan sebagai pendukung penelitian guna mencari fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya penggunaan data sekunder dalam penelitian dapat diperoleh melalui dokumen Laporan SPM Tahun 2015, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra 2010, Renja 2015 Hingga dokumen naskah Dinas Lainnya.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sebab penelitian kualitatif dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan hubungan langsung dengan subjek melalui wawancara mendalam dan untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan pengadaan data yang diperlukan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi dan asumsi-asumsi dalam membuktikan kebenaran penelitian. Menurut Moh. Nasir bahwa data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan [12]. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Wawancara dan Dokumentasi.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti kepada narasumber yang disebutkan dalam subjek dan objek penelitian. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen penting dan naskah Dinas SKPD terkait yang kemudian ditelaah untuk di olah sebagai data penunjang.

#### F. Teknik Analisis Data

Data Primer dan sekunder yang di dapatkan oleh peneliti mengenai pelaksanaan capaian SPM bidang pendidikan dasar kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan teori yang digunakan sesuatu dengan objek penelitian. Sedangkan menurut Moh Nasir bahwa analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk di baca. Pada penelitian ini ada tiga metode analisis data menjadi acuan dalam penulisan yang berdasarkan pada pendapat Huberman dalam Mukhtar bahwa analisis data deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [13] Senada dengan apa yang disampaikan Miles dan Huberman yang di kutip oleh Sugiyono yang membagi analisis data menjadi tiga komponen yaitu:

#### (a) Reduksi data.

Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

#### (b) Penyajian Data,

Kedua ahli ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan

#### (c) Penarikan kesimpulan.

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan kesimpulan akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan Kabupaten Bangka Tengah sudah diterapkan sejak tahun 2010 mengikuti instruksi permendiknas nomor 23 tahun 2013. Adapun evaluasi yang peneliti lakukan untuk melihat pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010 ini dilihat dari 5 indikator antara lain:

#### 1. Pemahaman Program

Pemahaman program adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemahaman Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013. Adapun pemahaman program dilihat dari 3 aspek yaitu:

#### (a) Pemahaman terkait perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 79 tahun 2007 Tentang Pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal menjelaskan bahwa rencana pencapaian SPM di daerah mengacu

pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar dijelaskan dalam Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 telah menetapkan 27 indikator SPM pendidikan meliputi:

(1) Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota

- 1) Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang sudah terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen didaerah terpencil.
- 2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis
- 3) Disetiap SMP/MTs tersedia ruang Lab. IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi & eksperimen peserta didik
- 4) Di setiap SD/MI & SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja & kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah & tenaga kependidikan lainnya, & disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
- 5) Di setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan & untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan..
- 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, & untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
- 7) Disetiap SD/MI tersedia 2 orang guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-IV & 2 orang guru yang telah memenuhi sertifikat pendidik
- 8) Disetiap SMP/MTs tersedia 2 orang guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-IV sebanyak 70% & separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memenuhi sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% & 20%.
- 9) Disetiap SMP/MTs tersedia 2 orang guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA & bahasa Inggris
- 10) Disetiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik SI atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik

11) Disetiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik SI atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik

12) Disetiap kabupaten/kota semuanya pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik SI atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik

13) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana & melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum & proses pembelajaran yang efektif

14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan & setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise & pembinaan

(2) Pelayanan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

1) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

2) Setiap SMP/MTs menyediakan menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

3) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA & Bahasa yang terdiri dr model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar & poster/carta IPA

4) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan & 10 buku referensi & setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan & 20 buku referensi

5) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik & melaksanakan tugas tambahan

6) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sbb :

Kelas I-II : 18 jam perminggu

Kelas III : 24 jam perminggu

Kelas IV-VI : 27 jam perminggu

Kelas VII-IX : 27 jam perminggu

7) Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8) Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

- 9) Setiap guru mengembangkan & menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
- 10) Kepala sekolah melakukan supervise kelas & memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
- 11) Peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
- 12) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) & ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik & menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau kantor kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.
- 13) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal tersebut menandakan seiring berjalannya waktu pemahaman pemerintah selaku penanggungjawab dibidang pendidikan terhadap indikator SPM semakin bagus. Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah juga telah menetapkan batas waktu pencapaian SPM hingga tahun 2014. Hal tersebut diatas menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah memahami amanat peraturan menteri dalam negeri terkait rencana pencapaian SPM di daerah.

Terkait pemahaman terhadap SPM dapat dilihat dari dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, pemerintah daerah kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Bangka Tengah sudah mengakomodir program dan kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 23 tahun 2013 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota yang telah menetapkan batas akhir capaian SPM bidang pendidikan berakhir pada tahun 2014.

Kemudian Dinas Pendidikan sudah membuat target capaian hingga 2015 dengan mengakomodir kegiatan dari program yang menunjang pelaksanaan SPM di daerah. Dapat dilihat dari 3 program pokok yang di jabarkan kepada 54 kegiatan dalam dokumen rencana kerja tahun 2015 menandakan adanya pengertian pemerintah daerah dalam mendukung pemerintah pusat pada upaya pencapaian SPM bidang pendidikan dasar jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2014 dan tahun 2013 yang hanya melaksanakan 24 kegiatan dari 3 program

yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

(b) Pemahaman dalam perencanaan pencapaian SPM

Penyusunan SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 ini mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010-2015 telah ditetapkan salah satu visi pembangunan daerah adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan salah satu tujuannya meningkatkan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut kemudian pemerintah membuat sasaran strategis peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat. Ditetapkannya peningkatan pendidikan sebagai salah satu sasaran strategis ini menandakan adanya dukungan yang serius dari pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di kabupaten Bangka Tengah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjadikan urusan pendidikan prioritas kedua dalam pembangunan daerah sesuai dengan amanat INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah sebagai salah satu penanggungjawab kemudian menuangkan visi misi pembangunan daerah kedalam visi dan misi SKPD Dinas Pendidikan antara lain:

- (1) Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini
- (2) Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar
- (3) Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah
- (4) Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan luar biasa
- (5) Mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang berdaya saing
- (6) Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- (7) Meningkatkan manajemen dan tata kelola pelayanan pendidikan

Visi dan misi yang disusun oleh Dinas Pendidikan guna mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah. Tidak hanya sampai pada penyusunan visi dan misi SKPD, Dinas pendidikan kemudian menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam jangka lima tahun pada dokumen Renstra priode 2010-2015 yaitu:

- Meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- Meningkatkan mutu layanan Pendidikan Dasar;
- Meningkatkan mutu layanan Pendidikan Menengah

- Meningkatkan mutu layanan Pendidikan Luar Biasa
- Meningkatkan mutu layanan pendidik dan Tenaga kependidikan
- Meningkatkan layanan Pendidikan yang berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;

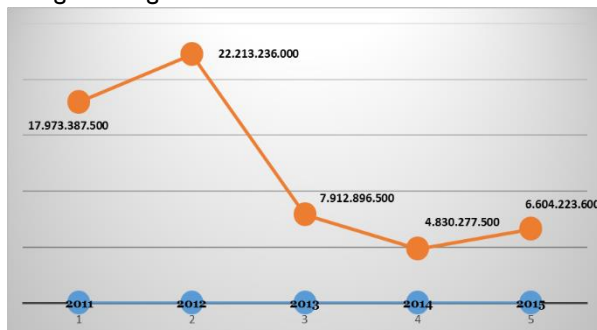
Tujuan tersebut diatas menjadi kerangka acuan dalam dokumen perencanaan berikutnya dalam rangka upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah dan SPM. Dalam mewujudkan visi di atas, selain didukung misi tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah menjabarkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hingga tahun 2015. Melihat keterkaitan antar dokumen perencanaan diatas menandakan perencanaan untuk bidang pendidikan sudah akuntabel.

### (c) Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran yang tinggi akan semakin memberikan akselerasi program kegiatan yang ada. Dalam definisinya, Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari:

- APBD
- APBN

Berikut secara lengkap dapat dilihat anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian SPM bidang Pelayanan Dasar Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana grafik dibawah ini:



Gambar 1. Anggaran Dinas Pendidikan tahun 2011 - 2015

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa selama kurun 5 tahun terakhir terjadi penurunan alokasi anggaran di Kabupaten Bangka Tengah. Anggaran yang terbatas ini menyebabkan pencapaian SPM bidang Pelayanan Dasar di Kabupaten Bangka Tengah tidak berjalan dengan optimal. Hal ini terkait dengan defisit anggaran yang dialami oleh Kabupaten Bangka Tengah. Permasalahan pendidikan merupakan urusan wajib sehingga harus menjadi fokus penanganan serius bagi Pemerintah Daerah

### 2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran dapat diartikan sebagai tolak ukur untuk melihat seberapa relevan program program yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Bangka Tengah dalam

mencapai standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana standar pelayanan minimal menjelaskan bahwa rencana pencapaian SPM harus terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKP, KUA dan PPA.

Mengacu pada Rencana Strategis tahun 2010-2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah menetapkan 7 (tujuh) program utama yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (Tapkin). Untuk mencapai 9 (Sembilan) sasaran strategis diatas kemudian Dinas pendidikan kabupaten Bangka Tengah diturunkan kedalam Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2015. Berdasarkan uraian kesinambungan program kerja pada tahun 2015 dengan sasaran dan indikator kinerja diatas. Dapat disimpulkan bahwa 6 program yang tertuang dalam dokumen renja tahun 2015 sudah terintegrasi dengan 7 (tujuh) program utama yang ditetapkan dalam dokumen Renstra ini sudah terintegrasi untuk membantu pelaksanaan capaian SPM. Dari keseluruhan program ini kemudian disasarkan untuk: Angka Partisipasi Kasar SD/MI, Angka Partisipasi Kasar MTs/SMP, Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Partisipasi Murni MTs/SMP, Angka Lulus SD/MI, Angka Lulus MTs/SMP Angka Putus Sekolah SD/MI, dan Angka Putus Sekolah MTs/SMP.

### 3. Tepat Waktu

#### a) Ketepatan penyampaian laporan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota menjelaskan bawah penyampaian laporan kinerja dan pencapaian SPM pendidikan dasar terbagi pada 2 jenis pelaporan yaitu : (1) Laporan Tahunan (2) Laporan Semester. Selama ini penyampaian laporan SPM bidang pendidikan dasar sudah dilakukan dengan tepat waktu oleh Dinas pendidikan Bangka Tengah baik kepada Leading organisasi pada tingkat daerah maupun kepada leading organisasi pada level provinsi.

#### b) Ketepatan waktu capaian SPM

Batas batas akhir pencapaian SPM pendidikan Kabupaten Bangka Tengah untuk indikator pelayanan pendidikan oleh kabupaten/kota berakhir pada tahun 2014. Namun realisasi pencapaian SPM hingga tahun 2015 masih belum maksimal. Pencapaian SPM pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak tepat sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan. Dapat dilihat dari 14 indikator ada 7 indikator yang belum tercapai pada tahun 2015. Keterlambatan pencapaian SPM bidang pendidikan sebenarnya bukan disebabkan ketidakmampuan daerah dalam melaksanakannya. Melainkan aplikasi pelaporan

SPM tidak bisa membaca jika salah satu komponen pada suatu indikator belum terpenuhi secara keseluruhan. Pada kenyataan dilapangan pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah Sudah Sangat Maksimal, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai dengan maksimal karena alokasi dana yang sangat terbatas.

#### 4. Tercapainya tujuan

Pada indikator berikut ini peneliti melihat realisasi pelaksanaan SPM pada tahun 2015. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah kabupaten Bangka Tengah. ada 14 indikator yang menjadi urusan pelayanan dasar Kabupaten/Kota sebagai mana yang telah ditetapkan dalam permendiknas nomor 23 tahun 2013, namun dari 14 tersebut ada 7 indikator yang yang tercapai 100% sebagaimana yang telah di tetapkan hingga tahun 2015.

- a. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang sudah terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen didaerah terpencil
- b. Di setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan & untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan.
- c. Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-IV & 2 orang guru yang telah memenuhi sertifikat pendidik
- d. Di setiap SMP/MTs tersedia 2 orang guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-IV sebanyak 70% & separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memenuhi sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% & 20%.
- e. Di setiap kabupaten/kota semuanya pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik SI atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik
- f. Pemerintah kabupaten/ kota memiliki rencana & melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum & proses pembelajaran yang efektif
- g. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan & setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise & pembinaan.

Selain 7 indikator yang tercapai diatas masih ada 7 indikator yang hingga tahun 2015 belum tercapai hingga 100% sebagaimana ditetapkan, adapun indikator yang belum tercapai tersebut yaitu:

- a. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis;

- b. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang Lab. IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi & eksperimen peserta didik;
- c. Di setiap SD/MI & SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja & kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah & tenaga kependidikan lainnya, & di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
- d. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, & untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- e. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-I atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
- f. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-I atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- g. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik SI atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik.

Dari 7 indikator yang belum tercapai diatas peneliti menemukan masih ada 2 indikator yang memiliki tingkat ketercapaian paling rendah yaitu terkait dengan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, & untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran dengan capaian 0%, Di setiap SMP/MTs tersedia 2 orang guru dengan kualifikasi akademik SI atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA & bahasa inggris dengan capaian 4,55%.

Dari temuan ini pemerintah Bangka tengah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan capaian 2 indikator diatas namun hasil yang diterima masih belum cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Namun ini menjadi hal serius bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk segera mencari solusi penanganan hal tersebut. Mengingat kedua hal tersebut merupakan bagian penting dalam pembangunan pendidikan untuk mencapai mutu sesuai dengan yang diharapkan.

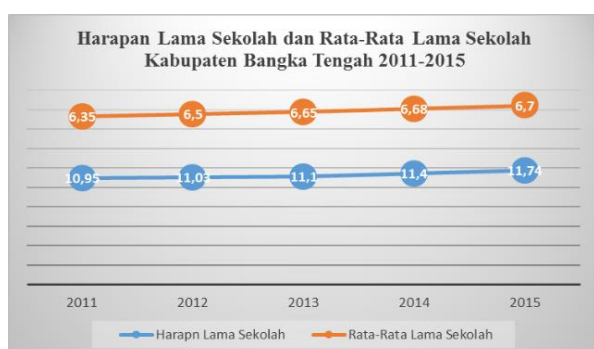
Tidak tercapainya target pelaksanaan indikator SPM bidang pendidikan dasar di kabupaten Bangka Tengah ini disebabkan belum lengkapnya perlengkapan laboratorium meskipun setiap sekolah sudah memiliki laboratorium dan perlengkapan maksimal namun aplikasi SPM tidak menganggap sebagai suatu hal yang terlaksana dengan baik. Selain itu kurangnya sumberdaya manusia terutama untuk guru mata pelajaran, namun hal ini sudah disiasati oleh pemerintah daerah dengan membuka rekrutment guru pada tahun 2014 meskipun hasil rekrutmen ini masih belum berimplikasi maksimal pada pelaksanaan indikator SPM bidang pendidikan dasar.



## 5. Perubahan Nyata

Indikasi keberhasilan suatu program dapat dilihat dari adanya perubahan dari sebelum dilaksanakannya program/kegiatan dengan sesudah terlaksananya program dan kegiatan. Dibuatnya indikator SPM oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan RI dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan angka pendidikan seperti angka partisipasi sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL), Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Implikasi dari penerapan SPM bidang pendidikan dasar kabupaten Bangka Tengah adalah Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 4 (empat) tahun sebelumnya sebagaimana yang disampaikan pada tabel dibawah ini:



Gambar 2. Grafik Angka rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah tahun 2011-2015 Kab. Bangka Tengah

Dari data diatas, dapat dilihat sepanjang tahun selama 5 tahun terakhir terdapat kenaikan untuk tingkat Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan semakin baik dari tahun ke tahun. Menjadi catatan penting dalam kajian ini walaupun meningkat setiap tahunnya tetapi peningkatan yang ada tidak tinggi sebab angka rata-rata lama sekolah masih berkisar pada 6 tahun yang itu artinya masih dengan skala pendidikan sekolah dasar. Akan tetapi dengan asumsi harapan lama sekolah yang juga semakin tinggi setiap tahunnya menjadi indikasi bahwa optimisme masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkat aksesibilitas dan mutu pendidikan di Bangka Tengah masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, perlunya kebijakan strategis pemerintah daerah terutama menyangkut sarana, mutu, dan infrastruktur penunjang pendidikan.

Selain angka rata-rata lama sekolah perubahan nyata juga tampak pada jumlah angka partisipasi sekolah (APS) pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang mengalami peningkatan sebagaimana yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel I. APS menurut Kelompok Usia

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	APS	
		2014	2015
7-14 Tahun	Laki-laki	98,23	100,00

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	APS	
		2014	2015
	Perempuan	99,30	98,94
	<b>Total</b>	<b>98,77</b>	<b>99,49</b>
	13-15 Tahun	Laki-laki	83,95
	Perempuan	91,45	96,39
	<b>Total</b>	<b>87,83</b>	<b>91,52</b>
	16-18 Tahun	Laki-laki	52,90
	Perempuan	64,43	63,48
	<b>Total</b>	<b>57,51</b>	<b>67,18</b>

Dari tabel diatas dapat peneliti jelaskan bahwa adanya peningkatan pada angka partisipasi sekolah di tahun 2015. Berdasarkan tabel diatas angka partisipasi sekolah di kelompokkan berdasarkan pada kelompok usia sekolah. Untuk usia sekolah 7-14 tahun pada tahun 2015 APS mencapai 99,49% dibandingkan pada tahun 2014 yang masih mencapai 98,77%. Untuk APS usia sekolah 13-15 Tahun pada tahun 2015 mencapai 91,52% jika dibandingkan pada tahun 2014 masih mencapai 87,83%, dan untuk usia pendidikan 16-18 Tahun APS pada tahun 2015 mencapai 67,18% dibandingkan tahun 2014 yang masih mencapai 57,51%. Dari perbandingan APS 2 (dua) tahun diatas dapat peneliti simpulkan salah perubahan nyata dari pelaksanaan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Tengah meningkatnya angka partisipasi sekolah pada tahun 2015. Hal ini menandakan pelayanan minimal untuk pendidikan dirasa memuaskan bagi masyarakat meskipun masih ada indikator yang belum terlaksana maksimal.

## IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar kabupaten Bangka Tengah sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2015. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar di kabupaten Bangka Tengah hingga tahun 2015 masih ada beberapa indikator yang belum tercapai. Namun pada penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bentuk pemahaman pemerintah kabupaten Bangka Tengah terhadap pemahaman program SPM ini di tandai dengan adanya target pencapaian dari tahun-tahun hingga 2015 selain itu pada setiap tahun pemerintah terus menerus mengakomodir program dan kegiatan pendukung penerapan capaian SPM tersebut.

Pelaksanaan SPM pendidikan kabupaten Bangka Tengah sudah tepat sasaran hal tersebut ditandai dengan sejalannya dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang SPM Bidang pendidikan, bahwa batas akhir pencapaian SPM pada tahun 2014. Dalam pelaksanaan capaian SPM, pemerintah kabupaten Bangka Tengah hingga tahun 2015 masih ada 7 indikator yang belum tercapai 100% sebagaimana target yang telah ditetapkan. Hal ini menjelaskan pencapaian SPM pendidikan belum tepat waktu. Namun pelaporan hasil pelaksanaan SPM tetap disampaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan target 100% untuk capaian setiap indikator. Namun ada beberapa indikator yang memiliki capaian sangat rendah dan tidak sesuai dengan target seperti indikator terkait peralatan Lab IPA dan jumlah guru yang bersertifikat pendidik untuk setiap mata pelajaran. Hal ini disimpulkan bahwa belum tercapainya tujuan dari capaian SPM pendidikan dengan sepenuhnya ditandai dengan jumlah 7 indikator SPM yang belum tercapai 100%

Tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan dapat di ukur dengan adanya perubahan secara nyata. Pelaksanaan SPM hingga tahun 2015 sudah memberikan perubahan nyata pada angka pendidikan kabupaten Bangka Tengah. Meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun merupakan implikasi dari pelaksanaan SPM bidang pendidikan meskipun rata-rata lama sekolah kabupaten Bangka Tengah berada pada posisi terendah nomor 2 dari 7 kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka pelaksanaan capaian SPM bidang pendidikan dasar beberapa saran dari peneliti kepada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah antara lain : perlu dukungan pemerintah pusat maupun kabupaten Bangka Tengah terutama dukungan anggaran yang optimal disertai dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, Selain anggaran, kualitas dan kuantitas SDM juga merupakan unsur pendukung keberhasilan penerapan SPM, sehingga pemerintah daerah diharapkan ada langkah khusus dalam upaya peningkatan kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Nurjanna Ladjin. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah. (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tengah)
- [2] Ratminto & Atik. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- [3] Moenir, H. A. S. 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta Bumi Aksara
- [4] Ibid
- [5] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- [6] Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita
- [7] Ibid
- [8] Handyaningrat, 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Mas agung
- [9] Sutrisno. 2007. Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia
- [10] Lexy. J. Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- [11] Sutrisno Hadi. 2001. Metodologi Research Jilid III. Yogyakarta: Andi Offset
- [12] Moh. Nazir. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- [13] Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group